

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Sewa Bagi Penyewa Berdasarkan PSAK 116 Studi Kasus BPJS Kesehatan Kedeputian

Hana Sirait¹, Alpindos Toweula², Nixon Sondakh³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Manado, Indonesia

E-mail: hanapsirait@gmail.com¹, altoweula85@gmail.com², Nixonsond2@gmail.com³

Article History:

Received: 20 Mei 2026

Revised: 27 Juli 2026

Accepted: 02 September 2026

Keywords: Akuntansi Sewa, Aset Hak Guna, Sewa Operasi, Sewa Pembiayaan.

Abstrak: BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan (UU No. 24 Tahun 2011) yang mengelola dua jenis dana, yaitu Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Dana BPJS. Dalam menjalankan operasional usahanya BPJS Kesehatan membutuhkan aset berupa rumah dinas dan kendaraan operasional. Aset tersebut diperoleh dengan cara sewa yang diangsur berdasarkan perjanjian kontrak kerja. Perlakuan akuntansi sewa atas aset tersebut dilakukan berdasarkan standar akuntansi PSAK 116 tentang Sewa. Dalam PSAK tersebut perlakuan akuntansi transaksi sewa di pisahkan antara sisi Lessee (Penyewa) dan Lessor (Pesewa). Dalam penelitian ini penulis membahas dari sisi penyewa. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi aset sewa pada BPJS Kesehatan berdasarkan PSAK 116. Fokus kajian mencakup lima area: pengidentifikasian kontrak sewa, pengukuran liabilitas, pencatatan transaksi, penyajian laporan, serta dampak perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, menggambarkan perlakuan akuntansi sewa dari sisi penyewa dan membandingkannya dengan standar akuntansi PSAK 116 menggunakan studi kasus transaksi sewa yang terjadi di BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menggunakan tingkat diskonto berbeda tiap tahun sesuai SBDK, yaitu 8,57% tahun 2025, 8,47% tahun 2024, dan 8,29% tahun 2023. Secara umum penerapan PSAK 116 sudah sesuai untuk pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa, namun penyajian laporan keuangan dan pengelompokan liabilitas belum konsisten. Transaksi sewa telah dikenakan PPh Pasal 23, tetapi pencatatan pajak masih perlu disesuaikan dengan peraturan.

PENDAHULUAN

Standar akuntansi sewa di Indonesia terus berubah mengikuti standar internasional (IFRS) agar laporan keuangan lebih transparan. Saat ini, PSAK 116 telah hadir menggantikan PSAK 73. PSAK 116 hadir menyempurnakan praktik akuntansi yang tidak tercatat (off balance sheet). Hal

ini dilakukan melalui poin-poin berikut: PSAK 116 mewajibkan pencatatan aset sewa dan liabilitas sewa secara konsisten, sebagai bentuk komitmen entitas untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan penghapusan perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan bagi penyewa untuk menciptakan standarisasi yang selaras dengan hal tersebut. Meski berlaku umum, praktik akuntansi PSAK 116 tidak berlaku untuk kegiatan tambang dan sumber daya alam, aset biologis, dan perjanjian konsesi jasa dan lisensi hak kekayaan intelektual. Penyewa boleh memilih tidak mencatat aset dan liabilitas apabila sewa jangka pendek maksimal hanya 12 bulan dan aset bernilai rendah (IAI, 2024). Bertambahnya kewajiban yang diakui oleh pihak penyewa, sehingga memicu peningkatan rasio utang terhadap modal sendiri maupun terhadap total aset.

Kondisi tersebut diikuti dengan penurunan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Lebih lanjut, peningkatan dana pinjaman (utang) ditemukan yang menonjol pada entitas yang beroperasi di sektor perdagangan dan jasa (Bialek-Jaworska et al., 2022). Penerapan PSAK 116 menghasilkan perubahan nilai aset akibat pengakuan awal sewa sebagai aset sewa yang diukur berdasarkan nilai kini (present value), kondisi ini tidak hanya meningkatkan nilai aset, tetapi juga menimbulkan kewajiban baru atas transaksi sewa yang tercermin sebagai kenaikan nilai utang dalam laporan keuangan di entitas jasa (Zulfaldi & Sulhan, 2023). Aset hak guna tidak memengaruhi nilai laba, karena aset tersebut berasal dari pengklasifikasian ulang seluruh kontrak sewa ke dalam akun aset tidak lancar di laporan posisi keuangan (Sihombing & Deliza Henny, 2024). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 116 berfungsi sebagai instrumen moderasi yang memperkuat peran stabilitas finansial dalam menekan fraud laporan keuangan, sekaligus melemahkan efek tekanan eksternal terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi pelaporan (Fatimah et al., 2024).

Penerapan PSAK 116 atas kontrak sewa antara pihak penyewa (lessee) dan pemberi sewa (lessor) mengharuskan penyesuaian dalam klasifikasi, pencatatan yang mencerminkan kondisi yang lebih realistis, serta penyajian laporan keuangan yang lebih handal, langkah-langkah ini turut memperkuat transparansi laporan keuangan (Baruma Sinaga, 2025). Selama periode lebih dari dua belas bulan, terjadi perubahan perlakuan akuntansi sewa dari pembayaran di muka menjadi Aset Hak Guna, sebelumnya, sewa dicatat sebagai biaya perolehan, sedangkan pada PSAK 116 diakui sebagai aset dan liabilitas sewa. Perbedaan ini menimbulkan penyesuaian pada saldo laba ditahan. Liabilitas juga berubah karena diakui sebagai kewajiban atas pembayaran sewa masa depan (Nurhasanah et al., 2026). Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial memilih melakukan kontrak sewa, nilai kontrak atau harga perolehan aset sewa lebih dari 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan jangka sewa lebih dari 12 bulan, hal ini aset sewa BPJS Kesehatan Kedeputan sudah hampir memenuhi PSAK 116, yang menjadi masalah pengakuan dan pencatatan liabilitas sewa sebagai liabilitas jangka pendek, Penyajian laporan keuangan di Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial terbagi dua Dana Jaminan Sosial (DJS) yang diatur ISAK 35 yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto & catatan atas laporan keuangan (CALK) dan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diatur PSAK 1 yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (BPJS Kesehatan, 2025) melakukan penyesuaian suku bunga dari 8,57%(posisi 31 Desember 2024) yang dihitung berdasarkan rata-rata suku bunga dasar kredit 91 bank di Indonesia, Perubahan kebijakan suku bunga diskonto yang terjadi setiap tahun secara langsung memengaruhi perhitungan nilai kini liabilitas sewa. Perlakuan akuntansi aset sewa yang dilakukan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial mencakup empat aspek:

(1) Pengakuan awal aset hak guna dan liabilitas jangka pendek,

- (2) Pengukuran nilai sekarang liabilitas sewa menggunakan suku bunga 8,57% ditahun 2025 & penyusutan aset sewa,
- (3) Pencatatan perbulanan beban penyusutan aset hak guna, liabilitas sewa jangka pendek, beban bunga, dan pencatatan PPh Pasal 23.
- (4) Penyajian laporan keuangan BPJS Kesehatan mengacu pada ISAK 35 yang diatur Perdir BPJS Kesehatan (Perdir BPJS Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Iuran.) & laporan keuangan PSAK 1 yang diatur (UU No. 24 Tahun 2011).

Pengukuran biaya penyusutan dan biaya bunga atas aset hak guna dan liabilitas sewa merupakan kewajiban kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK), khususnya PSAK 116. Kewajiban ini berlaku bagi BPJS Kesehatan sebagai entitas nirlaba yang mengelola Dana Jaminan Sosial Kesehatan diperoleh dari dua sumber utama, yaitu kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelompok Non-PBI. Dana PBI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan dana Non-PBI berasal dari iuran Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri, dan Bukan Pekerja (BP)/Pemberi Kerja. Dengan demikian, pencatatan biaya penyusutan dan biaya bunga secara akurat justru akan menghasilkan laporan keuangan BPJS Kesehatan yang disajikan secara wajar dan benar. Hal ini menjadi landasan utama bagi terwujudnya Good Corporate Governance yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness dalam pengelolaan dana publik yang mencapai triliunan rupiah, sekaligus menjadi prasyarat mutlak bagi keberlangsungan prinsip gotong royong yang menjadi dasar penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .Selain itu, penerapan PSAK 116 juga melibatkan aspek perpajakan terkait sewa, di mana pengakuan liabilitas sewa dapat mempengaruhi perhitungan PPH Final dan PPh pasal 23, dengan menggunakan metode net (potong langsung) atau metode gross up (tunjangan pajak).

Hal ini penting bagi BPJS Kesehatan sebagai entitas nirlaba untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, guna menghindari risiko ketidak sesuaian dalam pelaporan fiskal dan meminimalkan potensi sanksi perpajakan. Kelengkapan penerapan keempat aspek ini menentukan kualitas pelaporan keuangan BPJS Kesehatan Kedeputian. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna, seperti rekomendasi kebijakan akuntansi yaitu penyempurnaan PSAK 116, khusus dalam perlakuan akuntansi aset hak guna dan liabilitas sewa dengan meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian. Dan perpajakan aset sewa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian, khususnya yang berada di bidang perencanaan keuangan, serta bagi kantor cabang di wilayah kerjanya.

LANDASAN TEORI

Menurut Peryantaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 11 ((IAI), 2024).

PSAK 116 menerapkan model tunggal dalam mencatat sewa pada sisi penyewa. Standar ini mewajibkan penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa sejak kontrak mulai berlaku, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Tujuan penerapan ini adalah meningkatkan transparansi informasi keuangan dengan menampilkan kewajiban sewa yang sebelumnya tidak tercatat di laporan posisi keuangan. Suatu hak penggunaan aset dapat dipisahkan sebagai komponen kontrak tersendiri jika penyewa mampu memperoleh manfaat ekonomi secara mandiri atau dengan menggabungkannya pada sumber daya lain yang sudah dikuasai. Manfaat tersebut harus berasal dari barang atau jasa yang lazim diperdagangkan

terpisah. Selain itu, aset sewa tidak boleh memiliki ketergantungan tinggi terhadap aset lain dalam kontrak yang sama. Biaya administrasi yang tidak menghasilkan barang atau jasa tambahan digabung ke total pembayaran sewa dan dialokasikan ke komponen yang telah diidentifikasi. Pada pengakuan awal, liabilitas sewa diukur sebesar nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar dengan diskonto menggunakan suku bunga implisit atau suku bunga pinjaman inkremental. Aset sewa dicatat sebesar nilai liabilitas tersebut ditambah biaya langsung awal. Untuk pengukuran selanjutnya, aset hak guna umumnya menggunakan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Liabilitas sewa disesuaikan melalui beban bunga, pembayaran sewa, dan perubahan akibat modifikasi kontrak. Penerapan PSAK 116 membuat laporan keuangan lebih relevan karena seluruh kewajiban sewa material tercermin dalam laporan posisi keuangan.pengguna laporan.

METODE PENELITIAN

Studi kasus kualitatif ini menelaah penerapan PSAK 116 atas aset sewa di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dengan fokus pada klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian sewa. Penelitian juga menilai kepatuhan laporan keuangan terhadap PSAK 201 dan ISAK 335 melalui telaah dokumen dan wawancara semi terstruktur. Pendekatan studi kasus dipilih karena BPJS Kesehatan merupakan entitas nirlaba publik dengan kontrak sewa jangka panjang yang relevan untuk memahami konteks penerapan standar (Dameria, 2025). Penelitian ini menggunakan asumsi modal sebesar Rp. 3.787.878.788 untuk satu unit kantor. Nilai ini tersebut merupakan alokasi proporsional dari modal awal BPJS Kesehatan sebesar Rp. 2.000.000.000.000 sebagaimana diatur Pasal 41 UU Nomor 24 Tahun 2011, dibagi dengan total 528 unit kerja nasional. Asumsi ini diterapkan karena BPJS Kesehatan tidak menyajikan pemisahan aset neto per kantor dalam laporan keuangan yang dipublikasi. Seluruh hasil analisis yang menggunakan angka ini bersifat ilustratif.

HASIL

Berdasarkan wawancara dan beberapa dokumen, BPJS Kesehatan Kedeputan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 116 tentang Sewa yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Adapun kebijakan akuntansi aset sewa sebagai berikut:

Tabel. 1 Kontrak aset sewa BPJS Kesehatan Kedeputan

Mengadung sewa	Rumah Dinas	Mobil Mitsubishi Pajero	Mobil Toyota Zenix
Apakah terdapat aset indentifikasi	Ya, kontrak menyebut alamat Jl.winangun, Kec. Malalayang, aset spesifik, vendor tidak bisa diganti sepihak.	Ya, kontrak sebut nopol DD 1234. Ada nomor rangka dan mesin secara spesifik	Ya, kontrak sebut nopol DD 5678. Unik fisiknya jelas dan tidak bisa ditukar atau pemutusan perjanjian kontrak.
Apakah pelanggan dapat seluruh manfaat ekonomik?	Ya, BPS pakai 24 jam sebagai rumah tinggal pejabat. Tidak digunakan bersamaan dengan vendor. Output 100% untuk BPJS.	Ya, mobil ada selalu dikantor, dipakai deputi direksi dan terkadang ada tamu dari kantor pusat penjemputan menggunakan mobil tersebut, BBM dan supir	Ya, mobil digunakan untuk operasional harian kantor tersebut dan di hari libur tetap dikantor BPJS.

Tabel. 1 Kontrak aset sewa BPJS Kesehatan Kedeputian

		dari BPJS.	
Siapa yang mengarahkan penggunaan?	BPJS yang menentukan dipakai siapa, untuk ditempat tinggal atau kantor dan renovasi. Vendor tidak berhak mengatur.	BPJS yang menentukan rute kapan berangkat, untuk dibawa keluar kota. Vendor tidak boleh ikut campur operasi harian.	BPJS yang mengatur jadwal dan tujuan pemakaian. Vendor hanya maintenance berkala.

Sumber data : BPJS Kesehatan Kedeputian (2025)

Hasil identifikasi pada tabel 1 memperlihatkan bahwa ketiga kontrak memenuhi kriteria sewa menurut PSAK 116 aset sewa bersifat spesifik dan tidak dapat diganti sepihak, seluruh manfaat ekonomik digunakan BPJS, serta pengendalian penggunaan berada di pihak BPJS, karena itu, kontrak Rumah dinas, Mobil pajer, dan Mobil Zennix wajib mencatat sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan keuangan.

Tabel. 2 Daftar aset sewa mobil BPJS Kesehatan Kedeputian

Wilayah	Notes	Jenis sewa	Vendor	Nilai kontrak (RP)
Internal Kepwil	Sewa Mobil Dinas Depdirwil	Mobil Dinas	PT Pesonna Optima Jasa	332.866.800
Internal Kepwil	Sewa Mobil Dinas Operasional Zennix	Mobil Dinas	PT Pesonna Optima Jasa	225.600.000

Sumber data : BPJS Kesehatan Kedeputian (2025)

Tabel. 3 Daftar aset sewa mobil BPJS Kesehatan Kedeputian

Notes	Start date	End Date	Periode	Perpanjangan (asumsi)	Start date	Discount Rate
Mobil Dinas Depdirwil	28/09/2023	27/09/2025	24	27/09/2025	28/09/2023	8,29%
Mobil Dinas Operasional Zennix	24/07/2024	24/07/2026	24	24/07/2026	24/07/2024	8,47%

Sumber data : BPJS Kesehatan Kedeputian (2025)

Tabel. 4 Perhitungan suku bunga majemuk BPJS Kesehatan Kedeputian

Notes	Effective Monthly Discount Rate	Effective Discount Rate (1)	Effective Discount Rate (2)	Effective Discount Rate (3)	Effective Discount Rate (4)	Effective Discount Rate (5)	Effective Discount Rate (6)
Mobil Dinas Depdirwil	0,6658958 %	0,6659%	1,3362%	2,0110%	2,6903%	3,3741%	4,0625%
Mobil Dinas	0,67982918 %	0,6798%	1,3643%	2,0534%	2,7472%	3,4457%	4,1489%

Tabel. 4 Perhitungan suku bunga majemuk BPJS Kesehatan Kedeputian

Operasional Zennix							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : BPJS Kesehatan Kedeputian (2025)

Tabel. 5 Perhitungan suku bunga majemuk BPJS Kesehatan Kedeputian

Notes	EDR (7)	EDR (8)	EDR (9)	EDR(10)	EDR(11)	EDR(12)	EDR(13)
Mobil Dinas Depdirwil	4,7554%	5,4530%	6,1552%	6,8621%	7,5737%	8,2900%	9,0111%
Mobil Dinas Operasional Zennix	4,8570%	5,5698%	6,2875%	7,0101%	7,7376%	8,4700%	9,2074%

Sumber data : BPJS Kesehatan Kedeputian (2025)

Tabel. 6 Perhitungan suku bunga majemuk BPJS Kesehatan Kedeputian

Notes	EDR(14)	EDR(15)	EDR(16)	EDR(17)	EDR(18)	EDR(19)
Mobil Dinas Depdirwil	9,7370%	10,4677%	11,2033%	11,9438%	12,6893%	13,4397%
Mobil Dinas Operasional Zennix	9,9498%	10,6973%	11,4499%	12,2075%	12,9703%	13,7384%

Sumber data : BPJS Kesehatan Kedeputian (2025)

Tabel. 7 Perhitungan suku bunga majemuk BPJS Kesehatan Kedeputian

Notes	EDR(20)	EDR(21)	EDR(22)	EDR(23)	EDR(24)	PV MLP (RP)
Mobil Dinas Depdirwil	14,1950%	14,9555%	15,7209%	16,4915%	17,2672%	306.689.685,12
Mobil Dinas Operasional Zennix	14,5116%	15,2901%	16,0738%	16,8629%	17,6574%	207.508.432,61

Sumber data : BPJS Kesehatan Kedeputian (2025)

Berdasarkan Tabel 3, BPJS Kesehatan Kedeputian memiliki dua kontrak aset sewa Mobil operasional dengan total nilai Rp. 558.466.800 selama 24 bulan. Karena kontrak aset sewa tidak mencatumkan bunga implisit, Tabel 4 menunjukkan perhitungan suku bunga pinjaman inkremental sebesar 8,29% ditahun 2023 dan 8,47% ditahun 2024. Tingkat diskonto tersebut digunakan untuk menghitung nilai kini pembayaran aset sewa minimum. Hasilnya pada Tabel 8 menunjukkan nilai aset sewa dan liabilitas awal untuk Mobil dinas depdirwil Rp306.689.685,12 dan Mobil dinas operasional zennix Rp207.508.432,61. Nilai ini lebih rendah dari total kontrak karena efek pendiskontoan, sesuai prinsip pengukuran PSAK 116. Dengan demikian, kedua kontrak kerja

wajib diakui dalam laporan posisi keuangan BPJS Kesehatan Kedeputan.

Tabel. 8 Daftar aset sewa BPJS Kesehatan Kedeputan

Wilayah	Notes	Vendor	Nilai kontrak	Start date	End Date	Periode
Internal Kepwil	Rumah Dinas Deputi Direksi	Erry Enry	Rp. 50.000.000	13/11/2024	13/11/2025	12

Sumber data : BPJS Kesehatan Kedeputan (2025)

Tabel. 9 Daftar aset sewa BPJS Kesehatan Kedeputan

Notes	Discount Rate	Effective Monthly Discount Rate	Effective Discount Rate (1)	PV MLP
Rumah Dinas Deputi Direksi	8,47%	0,67982918%	0,6798%	Rp 50.000.000

Sumber data : BPJS Kesehatan Kedeputan (2025)

Selain aset sewa kendaraan, Tabel 9 memperlihatkan kontrak kerja Rumah dinas deputi direksi senilai Rp.50.000.000 untuk 12 bulan. Perhitungan pada Tabel 10 dengan tingkat diskonto 8,47% menghasilkan nilai kini yang sama dengan nilai kontrak, yakni Rp.50.000.000. Kondisi ini terjadi karena periode aset sewa yang singkat membuat pengaruh bunga tidak signifikan dan adanya perpanjangan kontrak kerja aset sewa BPJS Kesehatan Kedeputan untuk terus menggunakan aset.

Tabel. 10 Pengukuran selanjutnya aset sewa dengan metode garis lurus

No	1
Jenis Sewa	Perpanjangan Sewa Rumah
No Kontrak	-

Periode	LEASE LIABILITY				RIGHT OF USE ASSET		
	Beg. Balance	Payment	Interest	End. Balance	Beg. Balance	Depreciation Expense	End. Bal
2024 November	50.000.000	50.000.000	-	-	50.000.000	4.166.667	45.833.333
Desember	-	-	-	-	45.833.333	4.166.667	41.666.667
2025 Januari	-	-	-	-	41.666.667	4.166.667	37.500.000
Februari	-	-	-	-	37.500.000	4.166.667	33.333.333
Maret	-	-	-	-	33.333.333	4.166.667	29.166.667
April	-	-	-	-	29.166.667	4.166.667	25.000.000
Mei	-	-	-	-	25.000.000	4.166.667	20.833.333
Juni	-	-	-	-	20.833.333	4.166.667	16.666.667
Juli	-	-	-	-	16.666.667	4.166.667	12.500.000
Agustus	-	-	-	-	12.500.000	4.166.667	8.333.333
September	-	-	-	-	8.333.333	4.166.667	4.166.667
Oktober	-	-	-	-	4.166.667	4.166.667	0

Sumber data : BPJS Kesehatan Kedeputan (2025)

Pengukuran selanjutnya untuk aset sewa rumah dinas menggunakan penyusutan perbulan Rp.4.166.667 selama 12 bulan dan aset sewa sebesar Rp.50.000.000 dibayarkan secara lunas diawal kontrak kerja pada november 2024.

**Tabel. 11
selanjutnya aset
garis lurus dan**

No	1
Jenis Sewa	Kontrak Baru (Toyota Innova Zenis Type G Otomatis)
No Kontrak	05/SPK/KEPWI/N/0724

Period	LEASE LIABILITY				RIGHT OF USE ASSET		
	Beg. Balance	Payment	Interest	End. Balance	Beg. Balance	Depreciation Expense	End. Bal
2024 Juli	-	-	-	-	207.508.433	-	207.508.433
Agustus	-	207.508.433	9.400.000	1.410.703	207.508.433	8.646.185	198.862.248
September	-	199.519.135	9.400.000	1.356.389	191.675.529	8.646.185	182.266.063
Oktober	-	191.475.525	9.400.000	1.301.706	183.377.231	8.646.185	181.569.879
November	-	183.377.231	9.400.000	1.246.652	175.223.883	8.646.185	172.923.694
Desember	-	175.223.883	9.400.000	1.191.223	167.015.106	8.646.185	164.777.509
2025 Januari	-	167.015.106	9.400.000	1.135.417	158.750.534	8.646.185	155.613.324
Februari	-	158.750.534	9.400.000	1.079.232	150.429.756	8.646.185	146.985.140
Maret	-	150.429.756	9.400.000	1.022.665	142.052.421	8.646.185	138.338.955
April	-	142.052.421	9.400.000	965.714	133.618.135	8.646.185	129.692.770
Mei	-	133.618.135	9.400.000	908.375	125.126.510	8.646.185	121.046.586
Juni	-	125.126.510	9.400.000	850.647	116.577.157	8.646.185	112.400.401
Juli	-	116.577.157	9.400.000	792.526	107.969.682	8.646.185	103.754.216
Agustus	-	107.969.682	9.400.000	734.009	99.303.692	8.646.185	95.108.032
September	-	99.303.692	9.400.000	675.095	90.578.787	8.646.185	86.461.847
Oktober	-	90.578.787	9.400.000	615.781	81.794.568	8.646.185	77.815.662
November	-	81.794.568	9.400.000	556.063	72.950.632	8.646.185	69.169.478
Desember	-	72.950.632	9.400.000	495.940	64.046.571	8.646.185	60.523.293
2026 Januari	-	64.046.571	9.400.000	435.407	55.081.979	8.646.185	51.877.188
Februari	-	55.081.979	9.400.000	374.463	46.056.442	8.646.185	43.280.923
Maret	-	46.056.442	9.400.000	313.105	36.969.547	8.646.185	34.584.739
April	-	36.969.547	9.400.000	251.310	27.820.877	8.646.185	25.938.554
Mei	-	27.820.877	9.400.000	189.134	18.610.011	8.646.185	17.202.369
Juni	-	18.610.011	9.400.000	126.516	9.336.528	8.646.185	8.646.185
Juli	-	9.336.528	9.400.000	63.472	0	8.646.185	0

**Pengukuran
sewa dengan metode
liabilitas sewa**

Sumber data : BPJS Kesehatan Kedeputan (2025)

Tabel ini memperlihatkan penyusutan perbulan senilai Rp.8.646.185, aset sewa Mobil zennix selama 24 bulan dengan pembayaran Rp.9.400.000 perbulan. Nilai awal aset hak guna dan liabilitas sewa sebesar Rp.207.508.433, sementara liabilitas berkurang bertahap karena perbedaan bunga ditiap bulan dari Rp.1.410.703 menjadi Rp.63.472. Pada juli 2026, saldo liabilitas dan aset hak guna menjadi nol berakhirnya kontrak kerja.

Tabel. 12 Pengukuran selanjutnya aset sewa dengan metode garis lurus dan liabilitas sewa

No	2	
	Sewa Mobil Dinas Depdirwil	
Jenis Sewa	#REF!	
No Kontrak	#REF!	

Periode	LEASE LIABILITY				RIGHT OF USE ASSET		
	Reg.Balance	Payment	Interest	End.Balance	Reg.Balance	Depreciation Expense	End.Bal
2023 September	- 306.689.685	-	-	- 306.689.685	306.689.685	-	306.689.685
Oktober	- 306.689.685	- 13.869.450	- 2.042.234	- 294.862.469	306.689.685	- 12.778.737	293.910.948
November	- 294.862.469	- 13.869.450	- 1.963.477	- 282.956.496	293.910.948	- 12.778.737	281.132.211
Desember	- 282.956.496	- 13.869.450	- 1.884.136	- 270.971.242	281.132.211	- 12.778.737	268.353.474
2024 Januari	- 270.971.242	- 13.869.450	- 1.804.386	- 258.906.178	268.353.474	- 12.778.737	255.574.738
Februari	- 258.906.178	- 13.869.450	- 1.724.046	- 246.760.773	255.574.738	- 12.778.737	242.796.001
Maret	- 246.760.773	- 13.869.450	- 1.643.170	- 234.534.493	242.796.001	- 12.778.737	230.017.264
April	- 234.534.493	- 13.869.450	- 1.561.755	- 222.226.799	230.017.264	- 12.778.737	217.238.527
Mei	- 222.226.799	- 13.869.450	- 1.479.799	- 209.837.148	217.238.527	- 12.778.737	204.459.790
Juni	- 209.837.148	- 13.869.450	- 1.397.297	- 197.364.995	204.459.790	- 12.778.737	191.681.053
Juli	- 197.364.995	- 13.869.450	- 1.314.245	- 184.809.790	191.681.053	- 12.778.737	178.902.316
Agustus	- 184.809.790	- 13.869.450	- 1.230.641	- 172.170.981	178.902.316	- 12.778.737	166.123.579
September	- 172.170.981	- 13.869.450	- 1.146.479	- 159.448.010	166.123.579	- 12.778.737	153.344.843
Oktober	- 159.448.010	- 13.869.450	- 1.061.758	- 146.640.318	153.344.843	- 12.778.737	140.566.106
November	- 146.640.318	- 13.869.450	- 976.472	- 133.747.339	140.566.106	- 12.778.737	127.787.369
Desember	- 133.747.339	- 13.869.450	- 890.618	- 120.768.507	127.787.369	- 12.778.737	115.008.632
2025 Januari	- 120.768.507	- 13.869.450	- 804.192	- 107.703.250	115.008.632	- 12.778.737	102.229.895
Februari	- 107.703.250	- 13.869.450	- 717.191	- 94.550.991	102.229.895	- 12.778.737	89.451.158
Maret	- 94.550.991	- 13.869.450	- 629.611	- 81.311.153	89.451.158	- 12.778.737	76.672.421
April	- 81.311.153	- 13.869.450	- 541.448	- 67.983.150	76.672.421	- 12.778.737	63.893.684
Mei	- 67.983.150	- 13.869.450	- 452.697	- 54.566.397	63.893.684	- 12.778.737	51.114.948
Juni	- 54.566.397	- 13.869.450	- 363.355	- 41.060.303	51.114.948	- 12.778.737	38.336.211
Juli	- 41.060.303	- 13.869.450	- 273.419	- 27.464.271	38.336.211	- 12.778.737	25.557.474
Agustus	- 27.464.271	- 13.869.450	- 182.883	- 13.777.705	25.557.474	- 12.778.737	12.778.737
September	- 13.777.705	- 13.869.450	- 91.745	0	12.778.737	-	-

Sumber data : BPJS Kesehatan Kedeputan (2025)

Tabel ini memperlihatkan penyusutan perbulan senilai Rp.12.778.737, aset sewa Mobil zennix selama 24 bulan dengan pembayaran Rp.13.869.450 perbulan. Nilai awal aset hak guna dan liabilitas sewa sebesar Rp.306.689.685, sementara liabilitas berkurang bertahap karena perbedaan bunga ditiap bulan dari Rp.2.042.234 menjadi Rp.91.745. Pada juli 2026, saldo liabilitas dan aset hak guna menjadi nol berakhirnya kontrak kerja.

PEMBAHASAN

Tabel. 13 Pencatatan Jurnal BPJS Kesehatan Kedeputan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Rumah Dinas				
13/11/2024	Aset Hak Guna		50.000.000	
	Liabilitas Jangka Pendek Sewa			45.000.000
	Liabilitas PPh Pasal 4 ayat 2			5.000.000
13/11/2024	Liabilitas Jangka Pendek Sewa		45.000.000	
	Liabilitas PPh Pasal 4 ayat 2		5.000.000	
	Bank			50.000.000
13/11/2024	Beban Penyusutan Aset Hak Guna		4.166.667	
	Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna			4.166.667
Jurnal penyusutan perbulan s.d Oktober 2025				

Tabel. 13 Pencatatan Jurnal BPJS Kesehatan Kedeputan

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
Mobil Mitsubshi Pajero				
28/09/2023	Aset Hak Guna		306.689.695	
	Liabilitas Jangka Panjang Sewa			306.689.695
Jurnal pengakuan aset sewa dan liabilitas jangka panjang sewa				
28/10/2023	Beban Bunga		2.042.234	
	Liabilitas Bunga			2.042.234
Jurnal beban bunga sewa perbulan s.d September 2025				
28/10/2023	Beban Penyusutan Aset Hak Guna		12.778.737	
	Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna			12.778.737
Jurnal penyusutan aset sewa perbulan s.d September 2025)				
28/10/2023	Liabilitas Jangka Panjang Sewa		11.827.216	
	Liabilitas Bunga		2.042.234	
	Liabilitas PPh Pasal 23			249.900
	Bank			13.619.550
Jurnal pembayaran angsuran pokok & bunga I				
10/11/2024	Liabilitas PPh Pasal 23		249.900	
	Bank			249.900
Jurnal penyeteroran PPh Pasal 23 ke kas negara setiap tanggal 10 sebanyak 24 kali				
28/11/2023	Liabilitas Jangka Panjang Sewa		11.905.973	
	Liabilitas Bunga		1.963.477	
	Liabilitas PPh Pasal 23			249.900
	Bank			13.619.550
Jurnal pembayaran angsuran pokok & bunga II				
27/09/2025	Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna		306.689.695	
	Aset Hak Guna			306.689.695
Jurnal akhir masa sewa				
Mobil Toyota Zennix				
24/07/2024	Aset Hak Guna		207.508.432	
	Liabilitas Jangka Panjang Sewa			207.508.432
24/08/2024	Beban Bunga		1.410.703	
	Liabilitas Bunga Sewa			1.410.703
24/08/2024	Beban Penyusutan Aset Hak Guna		8.646.185	
	Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna			8.646.185
24/08/2024	Liabilitas Jangka Panjang Sewa		7.989.297	
	Liabilitas Bunga		1.410.703	
	Liabilitas PPh Pasal 23			169.369

Tabel. 13 Pencatatan Jurnal BPJS Kesehatan Kedeputian

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
	Bank			9.230.631
10/09/2024	Liabilitas PPH Pasal 23		169.369	
	Bank			169.369
24/09/2024	Liabilitas Jangka Panjang Sewa		8.043.611	
	Liabilitas Bunga		1.356.389	
	Liabilitas PPh Pasal 23			169.369
	Bank			9.230.631
24/07/2026	Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna		207.508.432	
	Aset Hak Guna			207.508.432

Sumber data : olahan

Tabel 14 merangkum pencatatan ketiga kontrak aset sewa BPJS Kesehatan Kedeoutian. Rumah dinas diakui Rp.50.000.000 pada 13/11/2024 dan langsung lunas setelah potong PPh Pasal 4 ayat 2 Rp.5.000.000, sehingga timbul beban penyusutan Rp.4.166.667 perbulan. Mobil pajero dicatat Rp. 306.689.695 pada 28/09/2023 dan Mobil Zennix Rp.207.508.432 pada 24/07/2024, keduanya dibayar cicilan sehingga setiap bulan muncul beban bunga dan penyusutan. Seluruh aset disusutkan dengan metode garis lurus hingga kontrak kerja berakhir.

Tabel. 14 Penyajian Laporan keuangan
BPJS Kesehatan Kedeputian
Laporan Laba/Rugi
31 Desember (Rupiah)

Tahun	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Beban :				
Beban Penyusutan Rumah Dinas		8.333.334	41.666.667	
Beban Penyusutan Mobil Toyota Zennix		43.230.925	103.754.216	60.523.293
Beban Penyusutan Mobil Pajero	38.336.211	153.344.843	115.008.632	
Beban Bunga Mobil Toyota Zennix		6.506.674	9.831.465	<u>1.753.429</u>
Beban Bunga Mobil Pajero	<u>5.889.906</u>	<u>16.230.666</u>	<u>4.056.543</u>	
Total Beban	44.226.117	277.646..441	274.317.522	62.276.722
Pajak :				
PPh Pasal 4 ayat 2		5.000.000		
PPh Pasal 23	749.700	<u>3.845.645</u>	4.281.528	1.185.583
Total Pajak	<u>749.700</u>	<u>8.845.645</u>	<u>4.281.528</u>	<u>1.185.583</u>
TOTAL	44.975.817	236.492.086	278.599.050	

Tabel. 14 Penyajian Laporan keuangan

**BPJS Kesehatan Kedeputan
Laporan Laba/Rugi
31 Desember (Rupiah)**

				63.462.305
--	--	--	--	------------

Sumber data : olahan

Tabel ini memperlihatkan dampak penerapan aset sewa terhadap Laporan laba/rugi BPJS Kesehatan Kedeputan periode 2023-2026. Total beban tertinggi terjadi ditahun 2024 sebesar Rp.277.646.441 yang terdiri dari jumlah penyusutan Rp.204.909.101 dan beban bunga berjumlah Rp.22.737.340, karena ketiga aset masih digunakan penuh. Pada tahun 2026, beban turun menjadi Rp.62.276.722 seiring berakhir kontrak kerja Rumah dinas November dan Mobil pajero september ditahun 2025, sehingga hanya tersisa cicilan Mobil zennix ditahun 2026.

Tabel. 15 Penyajian Laporan Keuangan

**BPJS Kesehatan Kedeputan
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember (Rupiah)**

Tahun	2023	2024	2025	2026
ASET				
ASET LANCAR				
Bank	3.707.184.527	3.279.996.381	2.777.660.288	2.650.151.413
Total Aset Lancar	3.707.184.527	3.279.996.381	2.777.660.288	2.650.151.413
ASET TETAP				
Aset Hak Guna Rumah Dinas		50.000.000	41.666.667	
Akumulasi Penyusutan Rumah Dinas		(8.333.333)	(41.666.667)	
Nilai Buku Rumah Dinas		41.666.667	0	
Aset Hak Guna Mobil Toyota Zennix		207.508.433	164.277.510	60.523.294
Akumulasi Penyusutan Toyota Zennix		(43.230.923)	(103.754.216)	(60.523.293)
Nilai Buku Toyota Zennix		164.277.510	60.523.294	1
Aset Hak Guna Mobil Pajero	306.689.685	268.353.474	115.008.631	
Akumulasi Penyusutan Mobil Pajero	(38.336.211)	(153.344.843)	(115.008.632)	
Nilai Buku Pajero	268.353.474	115.008.631	1	
Total Aset Tetap	268.353.474	320.952.808	60.523.295	
TOTAL ASET	4.039.409.321	3.858.549.617	3.294.797.417	3.164.349.530
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek		45.000.000		

Tabel. 15 Penyajian Laporan Keuangan

**BPJS Kesehatan Kedeputian
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember (Rupiah)**

Tahun	2023	2024	2025	2026
Liabilitas Jangka Panjang	<u>270.971.242</u>	120.768.508 <u>167.015.106</u>		
Total Liabilitas Jangka Panjang	270.971.242	287.783.614	64.046.571	
Liabilitas PPh Pasal 23	<u>5.247.900</u>	2.249.100 <u>3.218.011</u>	<u>1.185.583</u>	
Total Liabilitas PPh 23	5.247.900	5.467.111	1.185.583	
Liabilitas Bunga	<u>20.287.208</u>	4.056.543 <u>9.831.465</u>	<u>1.753.429</u>	
Total Liabilitas Bunga	20.287.208	13.888.008	1.753.429	
EKUITAS				
Modal	3.787.878.788	3.742.902.971	3.506.410.885	3.227.811.834
	<u>(44.975.817)</u>	<u>(236.492.086)</u>	<u>(278.599.050)</u>	<u>(63.462.305)</u>
Total Ekuitas	3.742.902.971	3.506.410.885	3.227.811.834	3.164.349.530
TOTAL LIABILITAS + MODAL	4.039.409.321	3.858.549.617	3.294.797.417	3.164.349.530

Sumber data : olahan

Tabel ini menunjukkan posisi aset hak guna BPJS Kesehatan Kedeputian naik Rp.320.952.808 ditahun 2024 dari pengakuan Rumah dinas dan Mobil zennix. Namun total aset justru turun dari Rp.4.039.409.321 menjadi Rp.3.858.549.617 karena penurunan akun aset lain diluar aset sewa. Nilai buku Rumah dinas nol per oktober 2025 dan Mobil pajero tersisaRp.1, sementara Mobil zennix masih Rp.60.523.294 sampai 2026. Sisa liabilitas jangka panjang berkurang dari Rp.270.971.242 menjadi Rp.64.046.571. Pada sisi liabilitas, saldo jangka panjang turun dari Rp.270.971.242 tahun 2023 menjadi Rp.64.046.571 tahun 2025 karena pelunasan cicilan Mobil zennix dan Mobil pajero. Sebesar Rp.45.000.000dipindahkan ke liabilitas jangka pendek 2024 sebab akan dibayar dalam 12 bulan. Beban bunga aset sewa tertinggi Rp.13.888.008 tercatat 2024 dan berkurang menjadi Rp.1.753.429 tahun 2025 seiring penurunan saldo liabilitas. Dampak aset sewa membuat ekuitas berkurang dari Rp.3.742.902.971 tahun 2023 menjadi Rp.3.164.349.530 tahun 2026. Penurunan terbesar Rp.278.599.050 terjadi 2025 akibat beban penyusutan dan bunga dari ketiga aset sewa sekaligus.

Tabel. 16 Penyajian Laporan keuangan

**BPJS Kesehatan Kedeputian
Laporan Arus Kas
31 Desember (Rupiah)**

Tahun	2023	2024	2025	2026
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(44.975.817)			
Arus Kas dari Aktivitas				

Tabel. 16 Penyajian Laporan keuangan

**BPJS Kesehatan Kedeputan
Laporan Arus Kas
31 Desember (Rupiah)**

Pendanaan				
Setoran Modal Awal	3.787.878.788			
Pembayaran Pokok Liabilitas	(35.718.444)			
Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>3.752.160.344</u>			
Saldo Kas Akhir 2023	3.707.184.527			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		(236.492.086)		
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Pembayaran Pokok Liabilitas		150.202.734 <u>40.493.326</u>		
Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		(190.696.060)		
Saldo Kas Akhir 2024		<u>3.707.184.527</u>		
Saldo Kas Akhir 2025		3.279.996.381		
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			(278.599.050)	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Pembayaran Pokok Liabilitas			(120.768.507) <u>(102.968.535)</u>	
Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			(223.737.042)	
Saldo Kas Akhir 2024			<u>3.279.996.381</u>	
Saldo Kas Akhir 2025			2.777.660.288	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				(63.462.305)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Pembayaran Pokok Liabilitas				(64.046.571)
Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				(64.046.571)
Saldo Kas Akhir 2025				2.777.660.288
Saldo Kas Akhir 2026				2.650.151.413

Sumber data : olahan

Tabel laporan arus kas memperlihatkan dampak pembayaran aset sewa terhadap kas BPJS Kesehatan Kedeputan tahun 2023-2026, Arus kas operasi selalu minus karena menampung beban penyusutan dan bunga.

Tabel. 17 Perhitungan Aset Sewa Pajak dengan Metode Potong

**BPJS Kesehatan Kedeputian
Akuntansi Pajak Sewa**

Nama Aset Sewa	Perhitungan Akuntansi Pajak
Rumah Dinas	$\text{PPh Final} = \text{Nilai Bruto} \times 10\%$ $\text{PPh Final} = 50.000.000 \times 10\%$ $\text{PPh Final} = 5.000.000$ $\text{Diterima Pesewa/Lessor} = \text{Nilai Bruto} - \text{PPh Final}$ $\text{Diterima Pesewa/Lessor} = 50.000.000 - 5.000.000 = 45.000.000$
Mobil Mitsubshi Pajero	$\text{Nilai Kontrak Aset Sewa} = 332.866.800$ $\text{DPP PPN} = \frac{111}{100} = 1,11$ $\text{DPP PPN} = \frac{332.866.800}{1,11} = 299.880.000$ $\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif PPh Pasal 23} \times \text{DPP PPN}$ $\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times 299.880.000$ $\text{PPh Pasal 23} = 5.997.600$ $\text{PPh Pasal 23 perbulan} = \text{PPh pasal 23 pertahun} : \text{Masa sewa}$ $\text{PPh Pasal 23 perbulan} = 5.997.600 : 24$ $\text{PPh Pasal 23 perbulan} = 249.900$
Mobil Toyota Zennix	$\text{Nilai Kontrak Aset Sewa} = 225.600.000$ $\text{DPP PPN} = \frac{111}{100} = 1,11$ $\text{DPP PPN} = \frac{225.600.000}{1,11} = 203.243.243$ $\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif PPh Pasal 23} \times \text{DPP PPN}$ $\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times 203.243.243$ $\text{PPh Pasal 23} = 4.064.865$ $\text{PPh Pasal 23 perbulan} = \text{PPh pasal 23 pertahun} : \text{Masa sewa}$ $\text{PPh Pasal 23 perbulan} = 4.064.865 : 24$ $\text{PPh Pasal 23 perbulan} = 169.369$

Sumber data : olahan

KESIMPULAN

BPJS Kesehatan menggunakan tingkat diskonto yang berbeda tiap tahun untuk menghitung nilai aset sewa, karena suku bunga pinjaman inkremental memang berubah mengikuti kondisi pasar. Perubahan ini sesuai dengan kebijakan BPJS Kesehatan yang menyesuaikan tingkat diskonto setiap akhir tahun. Acuan yang dipakai adalah rata-rata Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dari seluruh bank di Indonesia per tanggal 31 Desember. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset sewa pada BPJS Kesehatan Kedeputian secara umum sudah mengikuti ketentuan PSAK 116, terutama dalam pengakuan aset hak guna, pengukuran liabilitas sewa, serta pencatatan beban penyusutan dan bunga. Namun, masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai, seperti pengelompokan liabilitas dan penyajian laporan keuangan yang belum konsisten. Dari sisi perpajakan, transaksi sewa telah dikenakan PPh Pasal 23 yang dipotong langsung saat pembayaran kepada pihak lessor. Walaupun

sudah diterapkan, pencatatan pajaknya masih perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, keunggulan aset sewa bagi BPJS Kesehatan Kedeputan meliputi arus kas yang lebih stabil karena dana tidak terikat pembelian aset, kemudahan operasional tanpa proses jual beli jauh lebih rumit, pengalihan risiko kerusakan dan penyusutan ke lessor.

DAFTAR REFERENSI

- (IAI), Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 116. In *STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN* (pp. 01–106).
- Baruma Sinaga, P. (2025). Implementasi PSAK 116 Terkait Sewa Pada PT. ABC. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 17–28. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM>
- Białek-Jaworska, A., Dobroszek, J., & Szatkowska, P. (2022). Does the IFRS 16 affect the key ratios of listed companies? Evidence from Poland. *International Journal of Management and Economics*, 58(3), 299–315. <https://doi.org/10.2478/ijme-2022-0016>
- BPJS Kesehatan. (2025). *Perubahan Nilai Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sewa Aset Hak Damera, S. (2025). Buku Ajar Metode Penelitian (Penelitian Studi Kasus). <http://repository.uki.ac.id/18588/1/BukuAjarMetodePenelitianPenelitianStudiKasus.pdf>*
- Fatimah, S., Kusuma, I. C., & Didi. (2024). Pengaruh Variabel Financial Stability , External Pressure Terhadap Fraud Laporan Keuangan Dengan Penerapan Psak 116 Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 7(2), 129–137.
- Nurhasanah, D., Khairunisa, N., Audrinaya, V., Hermawan, T. P., Amelia, S., & Meidiyustiani, R. (2026). Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Implementasi Akuntansi Lessee Berdasarkan PSAK 116 Serta Dampak Dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia , PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) me. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 6(2), 559–584.
- Perdir BPJS Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Iuran.pdf. (n.d.).
- Sihombing, T. S., & Deliza Henny. (2024). Aset Hak Guna, Liabilitas Sewa, Beban Bunga Dan Beban Depresiasi Berpengaruh Terhadap Nilai Kualitas Laba Pada Perusahaan Industri Dasar Tahun 2021–2023. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 685–694. <https://doi.org/10.25105/v4i2.20937>
- UU No. 24 Tahun 2011. (2011).
- Zulfialdi, M. F., & Sulhan, M. (2023). ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI PSAK 116 PADA LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(2), 1346–1352.